

# GENERASI MUDA DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK

## *YOUTH GENERATION IN POLITICAL ETHICS PERSPECTIVE*

**Budi Kurniadi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana  
kurnia170765@gmail.com

---

### ABSTRAK

Eksistensi generasi muda sebagai agen pembaharu yang kritis, kreatif dan inovatif harus tetap tumbuh sebagai kekuatan penerus bangsa. Ingat seruan proklamator Ir. Soekarno yang mengatakan kalimat motivasi yang bermakna yaitu :“beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”, Ungkapan ini mengisaratkan betapa pentingnya peran pemuda sebagai aset bangsa .

Generasi muda tentu harus cermat dan berpikir kritis terhadap dinamika , menatap ke depan memaknai masa kini dan mempersiapkan diri sebagai pengganti generasi saat ini. Pepatah mengatakan “roda terus berputar”, tidak ada kekuasaan kekal kecuali kekuasaan absolut tuhan. Ini hendaknya dimaknai bahwa realitas politik pemerintahan kini dan yang akan datang pada seluruh dimensinya membutuhkan pemuda yang berkualitas, beretika dan bermoral sebagai calon generasi penerus yang menopang kejayaan bangsa dan negara.

Mahasiswa sebagai calon intelektual muda tentu harus respons terhadap dinamika sosial politik dan ini tidak berarti kampus dijadikan sarana untuk berpolitik praktis. Kelemahan pendidikan politik pada bangsa ini karena tidak banyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berperilaku politik dengan penghayatan etika serta moral.

**Kata kunci:** Generasi Muda, Mahasiswa, Etika Politik

### ABSTRACT

*The existence of the younger generation as a critical, creative and innovative reform agent must continue to grow as the nation's next power. Remember the appeal of the proclmator Ir. Soekarno who said a meaningful sentence of motivation, namely: "give me 10 young men will undoubtedly overtake the world", this expression indicates the importance of the role of youth as a national asset.*

*The young generation certainly must be careful and think critically about the dynamics, looking forward to interpreting the present and preparing themselves as a substitute for the current generation. The saying says "the wheel continues to spin", there is no eternal power except the absolute power of God. It should be interpreted that the political reality of the present and future government in all its dimensions requires qualified, ethical and moral youth as the next generation of candidates who sustain the glory of the nation and state.*

*Students as prospective young intellectuals certainly have to respond to the socio-political dynamics and this does not mean that the campus is used as a means to practice politics. The weakness of political education in this nation is because there are not many good political teachers who can teach how to behave politically with ethical and moral appreciation.*

**Keywords:** *Youth Generation, Students, Political Ethics*

## **I. Pendahuluan**

Secara historis peran pemuda sebagai salah satu kekuatan kelompok intelektual dengan idealisme transformasi revolusioner luar biasa untuk lepas dari belenggu kaum penjajah telah ditunjukkan melalui peristiwa Sumpah pemuda 1928 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat kebangsaan itu tentu tidak boleh pudar termakan waktu, zaman, dan lalai dengan perkembangan, tetapi eksistensi generasi muda sebagai agen pembaharu yang kritis, kreatif dan inovatif harus tetap tumbuh sebagai kekuatan penerus bangsa. Ingat seruan proklamator Ir. Soekarno yang mengatakan kalimat motivasi yang bermakna yaitu :“beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”, Ungkapan ini mengisaratkan betapa pentingnya peran pemuda sebagai aset bangsa .

Generasi muda tentu harus cermat dan berpikir kritis terhadap dinamika, menatap ke depan memaknai masa kini dan mempersiapkan diri sebagai pengganti generasi saat ini. Pepatah mengatakan “roda terus berputar”, tidak ada kekuasaan kekal kecuali kekuasaan absolut tuhan. Ini hendaknya dimaknai bahwa realitas politik pemerintahan kini dan yang akan datang pada seluruh dimensinya membutuhkan pemuda yang berkualitas, beretika dan bermoral sebagai calon generasi penerus yang menopang kejayaan bangsa dan negara.

Generasi muda dan politik adalah dua elemen atau bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan suatu bangsa, karena dari sisi itulah generasi muda dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional karena tidak

selamanya generasi sekarang terus bertahan, sehingga eksistensi generasi muda diharapkan dapat membawa perubahan berdemokrasi kearah yang lebih baik.

## **II. Realitas Politik Harapan dan Kenyataan**

Dinamika partai politik dalam berbangsa dan bernegara kerap kali menghadirkan masalah dan potret perpolitikan saat ini dipersepsikan telah mengabaikan etika dan moral secara massif. Proses marginalisasi Etika terjadi secara serius dan sedemikian rupa mengalami pergeseran nilai akibat transaksi informasi global dan pola pikir *pragmatis-materialisme* yang berimbas pada pengikisan dan peminggiran etika. Akibatnya etika tidak lagi dijadikan acuan dalam bertindak dan berperilaku elit politis. Sandiwara, drama dan dagelan politik, panggung sosial, arena penegakan supremasi hukum yang kita lihat saat ini hampir dominan mementaskan perilaku aktor miskin etika.

Pada tatanan politik praktis, etika politik yang diajarkan merupakan *academic exercise*, dan hanya menarik untuk dibicarakan pada konteks akademis di bangku-bangku kuliah, karena etika politik senyatanya telah terkubur dan sekedar *lipstick* penghias bibir. Saat ini kompetisi politik telah tereduksi pada persoalan kalah dan menang untuk meraih jabatan politik dan kekuasaan. padahal politik tanpa etika hanya akan melahirkan sinetron demokrasi, yang menyuguhkan tontonan kebohongan dan janji-janji elit yang mengancam kehidupan berdemokrasi. Lalu apa jaminannya untuk meningkatkan harkat, martabat dan ahlak bangsa apabila etika politik tidak lagi

menjadi acuan elit dalam berperilaku politik.

Politik memang seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional, walaupun politik bisa saja ditilik dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles), pengertian politik secara sederhana adalah teori, metode atau cara mempengaruhi orang sipil atau individu.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap etika disadari ataupun tidak telah melahirkan kehidupan politik tanpa rasionalitas, mengedepankan emosi dan kepentingan kelompok, pembuhuan karakter, menghalalkan segala cara, menabur potensi konflik serta lalai mengutamakan kepentingan berbangsa. Bentuk-bentuk pelanggaran inilah yang harus dicermati generasi muda, sehingga pelalaian terhadap etika berpolitik tidak terulang secara sistematis walaupun politik itu sarat dengan kepentingan untuk kekuasaan, tetapi berproses secara etis dan santun. Lalu apa yang harus disalahkan apabila potret perpolitikan kita menunjukkan ketidaketisan yang mengemuka?...secara akademis sasarannya pastilah pendidikan politik yang lemah. Lalu siapa yang bertanggungjawab?...penyelenggara pendidikan formal, informal, historis politik, budaya politik atau pengalaman politik?...inilah yang harus kita pecahkan bersama.

Pendidikan politik memang merupakan upaya edukatif yang sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara

moral dalam mewujudkan tujuan politik. Untuk menunjang hal tersebut peran pemuda merupakan kunci penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pemuda menjadi bagian dari itu, seperti ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa generasi muda memiliki posisi dan peran yang utama dalam mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang demokratis. Hal tersebut menunjukkan bahwa rakyat menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga generasi muda mutlak harus berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Spirit Undang-Undang Kepemudaan yang mengamatkan pemuda dalam setiap aspek menjadi bagian penting, namun pada implementasinya tidak selamanya berjalansesuai harapan. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemuda Indonesia menyadari peran penting mereka sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan negara dan pemuda memiliki kewajiban moral dalam mewujudkan generasi melek politik yang berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dalam membangun demokrasi. Upaya edukasi pendidikan politik dan demokrasi sejak dini terhadap para pemuda ini tidak lain adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya pada pemilihan umum presiden dan anggota legislatif.

### III. Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda dan etika politik

Mahasiswa adalah bagian dari generasi muda, karena berdasarkan Undang-Undang ditegaskan bahwa yang tergolong generasi muda (pemuda) adalah warga negara yang berusia antara 16 – 30 tahun. Setiap warga negara memiliki hak politik yang dijamin dengan Undang-Undang. Bagi mahasiswa hak politik ini tentu tidak boleh diapresiasi dalam bentuk kegiatan politik praktis di lingkungan kampus, tetapi diberi kebebasan untuk memilih, menentukan keikutsertaannya pada organisasi-organisasi politik termasuk organisasi kepentingan ataupun organisasi kepemudaan yang aktivitasnya hanya di luar kampus. Ketentuan ini adalah bentuk etika yang memagari aktivitas politik praktis bagi generasi muda (pemuda) yang tidak boleh dilanggar. Kampus bukanlah tempat berpolitik praktis, sehingga generasi muda (pemuda) haruslah pandai menempatkan perkara pada tempatnya.

Mahasiswa sebagai calon intelektual muda tentu harus respons terhadap dinamika sosial politik dan ini tidak berarti kampus dijadikan sarana untuk berpolitik praktis. Kelemahan pendidikan politik pada bangsa ini karena tidak banyak guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berperilaku politik dengan penghayatan etika serta moral. Politik itu harus mengedepankan *take and give*, berkonsensus yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat bukan menghasilkan orang-orang otoriter dengan gaya politik kekerasan dan penabur bibit-bibit konflik karena perilaku politiknya dipandu dengan nilai-nilai

emosional.

Terlalu kompleks persoalan yang dihadapi generasi muda (Mahasiswa) ke depan dan ini harus diurai dengan analitis kritis, sistematis oleh generasi penerus. Semangat reformasi yang diantaranya untuk memperbaiki hukum dan politikpun masih kurang memberikan makna bagi kemaslahatan rakyat, proses transformasi reformasi tidaklah membaik, hukum dan politik lebih sering dibelokkan dan menjadi instrumen untuk *statusquo* kekuasaan begitu pula institusi-institusi hukum masih belum mampu meredam kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktik-praktik kotor lainnya. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

### IV. Penutup

Politik kini telah menjelma dan dipraktikkan dengan perilaku yang minim kesantunan serta direduksi untuk alasan kekuasaan bukan proses mewujudkan kebaikan bersama, sementara politik identitas semakin menguat yang mengalahkan visi kebersamaan sebagai bangsa, walaupun itu syah dari perspektif

politik sebagai seni (arts) seperti ajaran teori maciavelli ,tetapi ini merupakan tantangan besar bagi generasi muda dalam mewujudkan politik santun, beretika yang tetap bercermin pada nilai-nilai luhur bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA:**

Alfian. 1990. Masalah dan Prospek

Pembangunan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.

Bachtiar, Farahdiba Rahma. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik, Volume 3, Nomor 1, hlm. 1-17.

Handoyo, Eko dan Puji Lestari,. 2017. Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon Cahaya.